

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Definisi pemberdayaan lingkungan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.¹⁰

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku Dakwah, Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.¹¹

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, hal. 57

¹¹ Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 169

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur –unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.¹²

Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.¹³ Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Ife yang dikutip dalam bukunya Edi Suharto, mengatakan bahwa, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya

¹² Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007), h. 75

¹³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), h. 87

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:¹⁴

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Kartasmita dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, hal. 59

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku *Pembangunan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan meliputi beberapa tujuan, yaitu:¹⁵

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk sesama
- f. Ketenteraman dan keamanan

Pemberdayaan lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan termasuk didalamnya masalah

¹⁵ Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 29

lingkungan, seperti lingkungan tempat tinggal mereka, apakah itu di kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan konservasi, dan lain sebagainya.

Yang perlu ditumbuhkan dalam pemberdayaan lingkungan adalah timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya.¹⁶ Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Pemberdayaan ini mengarahkan manusia agar sadar dengan kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan kekuatan yang telah ada menjadi berdaya dan dapat dimanfaatkan untuk aktifitas yang berarti. Pemberdayaan pada jenis ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia itu sendiri, dimana kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh yang bersangkutan secara mandiri.

¹⁶ Imansyah, *pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*, (<http://tribunpemberdayaanlingkungan.blogspot.com/>, diakses 8 Juli 2009)

Masalah dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan good governance, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Demikian pula halnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRD melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat

kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan.

Seperti kelompok-kelompok peduli lingkungan, LSM, individu-individu yang aktif dalam pelestarian lingkungan dan kritis terhadap kebijakan- kebijakan yang merugikan lingkungan, serta kalangan akademisi .Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektor dan cenderung terpusat, menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu:¹⁷

- a. Kekuatan pelestarian lingkungan perlu mendapat dukungan dari kekuatan- kekuatan politik primer
- b. Demi keberhasilan usaha pelestarian lingkungan, masyarakat perlu mempunyai keberdayaan, mampu dan aktif berperan serta secara efektif melalui mekanisme demokrasi.

¹⁷ Soikidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal 179

- c. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, perlu memiliki kemampuan penataan di bidang lingkungan hidup agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan.
- d. Penegakkan hukum yang tegas disertai upaya – upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hogan yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas* menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri atas 5 tahapan utama:¹⁸

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan.
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*Identify one problem or project*)
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*), dan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

¹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas.....*, h. 85

2. Tujuan pemberdayaan lingkungan

Tujuan pemberdayaan lingkungan adalah:¹⁹

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang merupakan hakikat pembangunan nasional dan hanya dapat dicapai apabila terdapat keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungannya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain, kehematan, daya guna, hasil guna, dan daur ulang. Untuk itu dapat digunakan bermacam-macam teknologi, baik teknologi modern maupun teknologi sederhana. Sumber daya yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sumber daya yang tak dapat terbaru, aspek-aspek tersebut mutlak harus diperhatikan. Disamping penghematan, yang tidak kalah pentingnya adalah, pencarian sumber daya alternatif guna memperoleh energi, misalnya berupa biogas, energi angin, energi surya, dan lain-lain.

¹⁹ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, pengelolaan dan penegakan hukumnya* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), hal. 70

- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Hal ini mengandung pengertian bahwa mengubah sifat manusia Indonesia dari perusak lingkungan menjadi Pembina lingkungan, sehingga diharapkan mampu melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.
- d. Terlaksananya pembanguna berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang dimaksud pembangunan berwawasan lingkungan disini adalah upaya sadar, berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Penggunaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembanguna secara berkesinambungan.hal ini mengandung pengertian pembangunan tanpa merusak lingkungan.
- e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran. Tujuan ini merupakan pelaksanaan dari hak kedaulatan negara dalam rangka membela kepentingan negara dan bangsa terhadap gangguan dari luar.

3. Tingkatan pemberdayaan

Sudah saatnya paradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintah sebagai sumber segala-galanya digeser dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat keberdayaan masyarakat samapai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang dikutip dalam bukunya Abu Huraerah adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungannya.

²⁰ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat* hal. 90

- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- e. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain:

- a. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin).
- b. Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
- c. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi ditingkat lokal.
- d. Upaya penguatan kebijakan.
- e. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

4. Pemberdayaan sebagai suatu program dan proses

Disamping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga

dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses.²¹

Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1, 2 ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program tersebut selesai, maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal ini banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dimana proyek yang satu dengan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan, bahkan tidak saling mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh bagian yang lain meskipun itu dalam satu lembaga yang sama.

Sementara itu, pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan suatu proses pemberdayaan yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang. Proses ini memerlukan waktu panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi). Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial, ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai kekuatan dalam pencapaian tujuan, yaitu pengembangan diri.

Pemberdayaan masyarakat sebagai program dan sebagai proses yang berkelanjutan sebenarnya merupakan pemikiran yang juga terkait

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas.....*, h. 84

dengan posisi agen pemberdayaan masyarakat. Bila agen pemberdaya masyarakat merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program pemberdayaan masyarakat akan diikuti dengan adanya pemutusan program, sedangkan bila agen pemberdaya masyarakat berasal dari intenal komunitas, pemberdayaan masyarakat akan dapat lebih diarahkan

5. Indikator keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip dalam bukunya Edi Suharto mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.²² Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.

Tabel berikut merupakan rangkuman tentang indikator keberdayaan.²³

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat	Kemampuan Kultural dan Politis
--------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. h. 63

²³ *Ibid*, h. 65

		Kesejahteraan	
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya - Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara - Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Assertiveness</i> dan proses hukum, politik otonomi - Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik. - Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik.
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap pelayan keuangan mikro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan, termasuk kemelekakan huruf - Status kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah. - Pengetahuan mengenai dan kebudayaan. - Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan.
Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan, sumber, dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. - Kontrol atas pendapatan aktifitas produktif keluarga yang lainnya. - Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. - Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. - Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.
Kekuasaan dengan: Meningkatkan solidaritas	<ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan tinggi dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada

<p>atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro</p>	<p>terutama dalam pekerjaan publik dan modern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memberi gaji terhadap orang lain - Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. 	<p>saat krisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis hukum pada tingkat masyarakat dan makro.
--	---	---	---

6. Prinsip pemberdayaan

Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yaitu:²⁴

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama dengan partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

²⁴ Ibid. hal 68

- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis dan berubah terus menerus.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

7. Strategi pemberdayaan

Pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu.²⁵

- a. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan dan konseling. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- b. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya

²⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat* hal. 92

digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

8. Peran pelaku perubahan (*Change Agent*) dalam pemberdayaan

Menurut Ife yang di kutip dari buku Isbandi Rukminto, ada beberapa peran yang dapat dilakukan petugas pengembangan masyarakat dalam praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, yaitu:²⁶

- a. Peran-peran fasilitatif
 - 1) Animasi sosial

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas.....*, hal. 91

Menurut Ife, keterampilan melakukan animasi sosial menggambarkan kemampuan pelaku perubahan ataupun pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak. Peran pelaku perubahan ataupun pemberdaya masyarakat disini bukanlah sebagai seseorang yang akan melaksanakan seluruh kegiatan oleh dirinya sendiri, tetapi lebih ke arah memampukan (*enable*) warga untuk mau terlibat aktif dalam proses perubahan di komunitas tersebut.

2) Mediasi dan negoisasi

Pelaku perubahan dalam upaya melakukan intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana) kadangkala bertemu dengan situasi di mana terjadi konflik minat dan nilai dalam komunitas. Konflik ini sering kali tidak terhindarkan karena dalam suatu komunitas tidak jarang terdapat berbagai perbedaan minat dan cara pandang dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut.

Terkait dengan hal di atas, seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi

ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut. Peran sebagai mediator ini tentu saja terkait dengan peran sebagai negoisator karena di tengah kelompok yang sedang berkonflik, tidak jarang seorang pelaku perubahan harus mampu menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tersebut tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan yang lebih mendalam. Artinya seorang pemberdaya masyarakat tidak boleh memihak satu diantara kelompok masyarakat tersebut

3) Pemberi dukungan

Salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu sendiri tidak selalu bersifat materiil, tetapi dapat juga bersifat seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan warga, seperti menyediakan waktu bagi warga bila mereka ingin berbicara

dengannya guna membahas permasalahan yang mereka hadapi.²⁷

4) Fasilitasi kelompok

Ife melihat bahwa banyak waktu yang digunakan oleh pelaku perubahan dihabiskan dalam kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, keefektifan kerja dari pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat juga akan sangat terkait dengan keterampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil. Disinilah kemampuan memfasilitasi kelompok dari agen pemberdaya masyarakat ujian Karena keanekaragaman masyarakat.

Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu modal sosial karena adanya unsur norma (*norms*) dan nilai (*values*) dalam kelompok tersebut serta adanya kepercayaan yang merupakan suatu ciri modal sosial. Hal yang menjadi masalah adalah mampukah si pelaku perubahan memfasilitasi kelompok-kelompok warga tersebut agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara lebih utuh dan bukan sekedar

²⁷Ibid, hal. 92

membangun satu atau dua kelompok saja. Dalam beberapa situasi, seorang pemberdaya masyarakat dapat melakukan peranan fasilitatif dalam kelompok. Dia bisa terlibat sebagai ketua kelompok atau sebagai anggota kelompok untuk membantu kelompok tersebut dalam mencapai tujuan secara efektif.

Berbagai diskusi tentang upaya mengembangkan kelompok selalu terkait dengan peran-peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat. Hal *pertama* yang harus dilakukan adalah memfokuskan pada membantu kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan (misalnya, membantu membangun taman bermain atau membantu merenovasi rumah warga), sedangkan hal yang *kedua* lebih mengarah pada bagaimana menciptakan kelompok tersebut. Dari pandangan Ife, dalam pembangunan suatu komunitas, justru proses itulah yang lebih memainkan peranan utama di bandingkan dengan sekedar hasil yang ingin dicapai.

5) Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan

Pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas

maupun kelompok. Misalnya, ada kelompok yang mempunyai keterampilan membuat batik, ada pula kelompok warga yang terampil membuat makanan, seperti keripik kentang, talas, tempe dan ada juga warga yang terampil membuat kerajinan tangan, seperti kalung dan gelang. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pelaku perubahan sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka.

Berbagai kelompok ini harus mendapat perhatian dari pemberdaya masyarakat sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka, yang tentu saja disini dipertimbangkan pula potensi daerah pemasaran dimana produk tersebut bisa diterima.

6) Mengorganisasi

Peran terakhir dari pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan.

b. Peran-peran pendidikan

Jika peran-peran fasilitatif melibatkan petugas perubahan masyarakat dalam *menstimulasi* dan mendorong proses-proses kemasyarakatan, maka peran-peran pendidikan menuntut petugas pengembangan masyarakat untuk lebih aktif dalam penyusunan agenda.

Petugas pengembangan masyarakat tidak hanya membantu pelaksanaan, tetapi juga harus lebih berperan aktif dalam memberikan masukan secara langsung, sebagai hasil dari pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya.²⁸

1) Peningkatan kesadaran

Peningkatan kesadaran diawali dengan upaya membangun hubungan antara hubungan personal dengan kepentingan politisi, atau kepentingan individual dengan kepentingan struktural. Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan yang dialaminya dalam perspektif sosial dan politik yang lebih luas.

Hal ini dilakukan karena memisahkan permasalahan yang bersifat personal dengan struktur sosial dan politik seringkali justru menjadi penyebab terjadinya ketidakberdayaan. Dalam upaya agar masyarakat mau dan

²⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*, hal. 155

mampu mengatasi ketidakberuntungan structural mereka, warga harus mau menjalin hubungan antara satu dan lainnya. Hal inilah yang menjadi tujuan awal dari penyadaran masyarakat.

Komponen penting yang lain dari peningkatan kesadaran masyarakat adalah .²⁹

Pertama, membantu masyarakat untuk dapat melihat berbagai alternatif yang ada. Masyarakat tidaklah perlu hanya melihat kehidupan seperti apa adanya saat ini karena dengan mau melihat dunia ini dari sudut pandang yang lain, seringkali justru dapat memunculkan beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Kedua dalam proses penyadaran adalah menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial di mana warga dapat berpartisipasi dan bertindak secara efektif .

2) Pemberian informasi

Pelaku perubahan dalam upaya memberdayakan masyarakat tidak jarang juga harus menyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh komunitas

²⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 98

sasarannya. Membantu memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat merupakan satu di antara peran penting seorang pelaku perubahan masyarakat. Aspek-aspek yang berkaitan dengan informasi demografi dan indikator-indikator sosial, seperti: struktur usia, tingkat kematian, tingkat kenakalan remaja, distribusi pendapatan dapat menjadi informasi penting bagi masyarakat untuk menyusun profil bagi mereka sendiri.

Dalam kasus yang berbeda, pelaku perubahan juga dapat memberikan informasi yang berguna antara lain dengan menggambarkan kesuksesan suatu program yang telah dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang mempunyai kemiripan dengan komunitas sasaran. Meskipun mereka mempunyai perbedaan budaya, kadangkala tetap penting untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan di daerah atau negara lain.³⁰

3) Pelatihan

Pelatihan merupakan peran pendidikan yang paling spesifik karena secara mendasar dapat memfokuskan pada upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang berguna bagi mereka secara

³⁰ Ibid , hal. 103

khusus dan lebih luas lagi bagi komunitasnya. Dalam beberapa kasus, pelaku perubahan belum tentu bertindak sebagai instruktur dalam suatu pelatihan warga, tetapi pelaku perubahan lebih banyak berindak sebagai penghubung guna mencarikan tenaga yang ahli dalam pelatihan tersebut.

Pelatihan pada dasarnya akan lebih efektif bila keterampilan yang di ajarkan adalah keterampilan yang di inginkan oleh masyarakat. Dalam arti, masyarakat dilibatkan dalam proses menentukan pelatihan apa yang mereka inginkan.

Sedangkan peran petugas pengembangan masyarakat menurut Zastrow yang di kutip dalam buku Abu Huraerah adalah:³¹

1) *Enabler* (pemercepat perubahan). Peran sebagai *enabler* adalah, membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasikan masalah-masalah mereka dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peranan sebagai *enabler* ini adalah

³¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*, hal 149

peranan klasik atau tradisional dari seorang pengembang masyarakat. Fokusnya adalah menolong masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Ada empat fungsi utama yang dilakukan pengembang masyarakat sebagai pemercepat perubahan (*enabler*), yaitu: membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka, membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat, mengembangkan relasi yang baik dan memfasilitasi perencanaan yang baik.

2) *Broker* (Perantara). Peranan seorang *broker* adalah, menghubungkan individu-individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat, tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peranan ini dilakukan seorang *broker* karena individu atau kelompok tersebut kerap kali tidak mengetahui dimana dan bagaimana mendapatkan pertolongan tersebut.

3) *Educator* (pendidik). Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pengembang masyarakat diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang

menjadi sasaran perubahan. Di samping itu, ia juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Dalam hal ini, tidak jarang seorang pengembang masyarakat harus menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai materi tersebut. Aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan bagi seorang pengembang masyarakat untuk selalu belajar.

4) *Expert* (tenaga ahli). Sebagai seorang expert, pelaku perubahan berperan menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area. Seorang expert juga harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan bukanlah mutlak harus di jalankan klien mereka, tetapi usulan dan saran tersebut lebih merupakan gagasan sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam pengambilan keputusan.

5) *Social planner* (perencana sosial). Seorang perencana sosial berperan mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terdapat dalam komunitas serta menyusun alternatif tindakan dalam menangani masalah tersebut. Seorang sosial planner lebih lebih memfokuskan pada keterlibatan dalam tugas-tugas pengembangan dan pengimplementasian program. Menurut Zastrow, peran

expert dan *social planner* saling tumpah tindih, dimana seorang *expert* lebih memfokuskan pada pemformulasian usulan dan saran yang terkait dengan isu dan permasalahan yang ada, sedangkan perencana sosial lebih memfokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

6) *Advocate* (advokasi). Peranan sebagai advokasi dipinjam dari profesi hukum. Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana pelaku perubahan melaksanakan fungsinya sebagai advokat yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan tersebut tidak memperdulikan ataupun menolak tuntutan masyarakat.

7) *Activist* (aktivis). Sebagai aktivis, seorang pengembang masyarakat senantiasa melakukan perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya atau kekuatan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Seorang aktivis biasanya mencoba menstimulasi kelompok yang kurang diuntungkan tersebut untuk mengorganisasi diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada.

B. Landasan teori

Menurut Wrihatnolo, Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu:³²

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya, memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, dan *belief*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu membangun (diberdayakan), dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut *capacity building*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana

³² Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowito, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hal. 2

memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang diotonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonom yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment*. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prosedur pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita seringkali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

Twelvetrees membagi perspektif teoritis pemberdayaan masyarakat kedalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal.³³ Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki pemberian layanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sedangkan pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hal. 40

sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformasional. Tabel berikut merupakan rangkuman dari dua perspektif pemberdayaan masyarakat:

Pendekatan	Perspektif	Tujuan/asumsi
Professional (tradisional, netral, teknikal)	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan masyarakat - Pengorganisasian masyarakat - Pembangunan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat. -Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada.
Radikal (transformasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi masyarakat berdasarkan kelas - Aksi masyarakat berdasarkan gender -Aksi masyarakat berdasarkan ras 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat - Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi -Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang

		menindas, diskriminatif dan eksploitatif.
--	--	---

C. Penelitian terdahulu yang relevan

Dalam sudut pandang pemberdayaan lingkungan. penelitian tentang pemberdayaan lingkungan belum pernah diteliti khususnya untuk lingkup jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Lingkungan Melalui Pendidikan Daur Ulang Sampah Di Kelurahan Jambangan Kec Jambangan Surabaya). Penelitian ini obyek dan sarannya ditekankan pada peran seorang perempuan dalam pemberdayaan lingkungan dan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.